



DEW PERIKHILAIHAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Edisi Kamis, 13 November 2025



RINGKASAN BERITA HARI INI



BOLONG: Petugas LPBI MWC NU Kecamatan Candi Deni Wahyu turut mengecek kondisi rumah Malich yang atapnya ambuk usir diterjang angin kencang. Perbaikan rumah dibantu pemerintah.

Angin Kencang Rusak Rumah di Candi

SIDOARJO - Hujan deras dan angin kencang yang terjadi di Kota Delta tidak hanya melahukan genangan. Satu rumah di Desa Tenggahan, Candi, rusak gara-gara diterjang angin kencang. Korban terparah mengungsi karena hunian tak layak ditempati. Pemilik rumah, Malich, menjelaskan jika musibah yang dialami terjadi Selasa (11/11) sore. Saat itu, hanya ada suaminya di kamar. "Saya dibantu anak-anak untuk pindah ke rumah tetangga. Dia berharap ada bantuan dari pemerintah untuk memperbaiki rumah," kata Malich.

Dinas Pangan dan Pertanian Gelar FKP

SIDOARJO - Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo menggelar Forum Komunikasi Petani (FKP) di ruang pertemuan Dinas Pertanian, Rabu (12/11). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara Dinas Pangan dan Pertanian dengan petani di Kecamatan Candi. Dalam acara ini, Kepala Dinas Pangan dan Pertanian, Dr. H. Nur Hafidza, menyampaikan pentingnya peran petani dalam mendukung ketahanan pangan nasional.



Single Submisi yang sering digelar pemerintah daerah untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara pemerintah dengan masyarakat.



Cek Kesehatan Gratis Sasar 5.000 Warga

Digelar Serentak di 31 Puskesmas. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dan memberikan layanan kesehatan gratis kepada masyarakat.

SIDOARJO - Cek kesehatan gratis (CKG) digelar serentak di 31 Puskesmas di Kabupaten Sidoarjo, Selasa (12/11). Acara yang digelar dalam rangka Hari Kesehatan Nasional (HKSN) 2025 ini menyasar 5.000 warga Kota Delta. Para peserta akan menjalani pemeriksaan kesehatan secara gratis, meliputi pemeriksaan tensi darah, gula darah, kolesterol, dan pemeriksaan lainnya.



Atap Rumah Warga Candi Ambruk Diterjang Angin Kencang

Hujan dan angin kencang menerjang Desa Tenggahan, Kecamatan Candi, Selasa (11/11) kemarin. Hal tersebut menyebabkan atap rumah warga rusak parah. Petugas LPBI MWC NU Kecamatan Candi Deni Wahyu turut mengecek kondisi rumah yang rusak.

Pemkab Sidoarjo Bikin Masterplan Atasi Banjir

PEMKAB Sidoarjo juga berupaya menangani banjir di enam kecamatan. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sidoarjo M. Ainur Rohman mengatakan, penanganan banjir di Sidoarjo tidak hanya tanggung jawab pemkab saja. Tetapi, juga berkaitan dengan kewenangan pemerintahan pusat. "Hal-hal teknis sudah kami koordinasikan, karena persoalan banjir ini tidak bisa diselesaikan sendiri oleh daerah. Harus ada sinergi antarlevel pemerintahan," ujar Ainur kemarin (12/11).

Peringati HKN, Gelar Cek Kesehatan Gratis ke 5.000 Warga

KOTA-Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) 2025 di Sidoarjo digelar dengan Cek Kesehatan Gratis (CKG) secara serentak Rabu (12/11). Kegiatan tersebut menyasar sekitar 5.000 warga melalui 31 puskesmas. Pita Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Sidoarjo, M. Ainur Rahman mengatakan, langkah ini merupakan upaya untuk menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat.

"Kita mengurangi hal-hal yang bersifat seremonial, tapi langsung ke kegiatan yang bisa dirasakan masyarakat," ucapnya saat ditemui Radar Sidoarjo. Menurut rencana, pelaksanaan CKG serentak ini menjadi momentum penting. Sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat.

Komisi C DPRD Sidoarjo Dukung Frontage Road

Sidoarjo - HARIAN BANGSA. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo menargetkan pembangunan frontage road (jalan pendamping) yang sejajar dengan jalan utama dari Waru sampai Buduran tahun 2026 mendatang. Penuntasan frontage road yang sudah berubah-tubuh ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan mengurangi kemacetan di jalur utama Sidoarjo. Komisi C DPRD Sidoarjo Suryono, Pramono ini mengatakan, anggaran Rp 40 miliar yang disiapkan Pemkab untuk penuntasan frontage road sangat penting. "Kita harus memastikan bahwa anggaran ini benar-benar digunakan untuk pembangunan frontage road yang berkualitas," ujarnya.

Polsek Balongbendo



JAGA KESELAMATAN: Polisi mengintensifkan patroli perahu tambak untuk mencegah aksi sungai yang meluas. Patroli ini bertujuan untuk memastikan keamanan di perairan tambak dan mencegah terjadinya insiden.

Komisi C DPRD Sidoarjo Dukung Penuntasan Frontage Road dengan Anggaran Rp 40 Miliar

Sidoarjo, Memorandum. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo menargetkan pembangunan frontage road (jalan pendamping) yang sejajar dengan jalan utama dari Waru sampai Buduran tahun 2026 mendatang. Penuntasan frontage road yang sudah berubah-tubuh ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan mengurangi kemacetan di jalur utama Sidoarjo. Komisi C DPRD Sidoarjo Suryono, Pramono ini mengatakan, anggaran Rp 40 miliar yang disiapkan Pemkab untuk penuntasan frontage road sangat penting. "Kita harus memastikan bahwa anggaran ini benar-benar digunakan untuk pembangunan frontage road yang berkualitas," ujarnya.

Diperbanyak oleh Bagian Persidangan dan PerUndang-Undangan Sekretariat DPRD Sidoarjo

Peringati HKN, Gelar Cek Kesehatan Gratis ke 5.000 Warga

KOTA-Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) 2025 di Sidoarjo digelar dengan Cek Kesehatan Gratis (CKG) secara serentak Rabu (12/11). Kegiatan tersebut menyasar sekitar 5.000 warga melalui 31 puskesmas.

Plt Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Sidoarjo, M. Ainur Rahman mengatakan, langkah itu merupakan upaya untuk menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat.

"Kita mengurangi hal-hal yang bersifat seremonial, tapi langsung ke kegiatan yang bisa dirasakan masyarakat," ucapnya saat ditemui Radar Sidoarjo.

Menurutnya, pelaksanaan CKG serentak ini menjadi momentum penting. Sekaligus memper-



TERBAIK: Plt Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Sidoarjo, M. Ainur Rahman (dua dari kiri) memberikan hadiah ke pemenang lomba Hari Kesehatan Nasional.

tegas tanggung jawab semua pihak dalam menyiapkan generasi yang sehat di masa depan.

"Melalui pemeriksaan kesehatan gratis, masyarakat diharapkan lebih sadar akan pentingnya memantau kondisi kese-

hatannya secara berkala," katanya.

Dalam CKG serentak pemeriksaan meliputi banyak hal. Seperti pemeriksaan fungsi mata, pengecekan kesehatan gigi, tensi hingga gula darah.

Sementara itu, Ketua

Panitia HKN Sidoarjo dr. Djoko Setijono menjelaskan, total ada 31 puskesmas yang melaksanakan kegiatan CKG dengan target 150 peserta di tiap puskesmas, sehingga total mencapai 4.650 orang.

● Ke Halaman 10



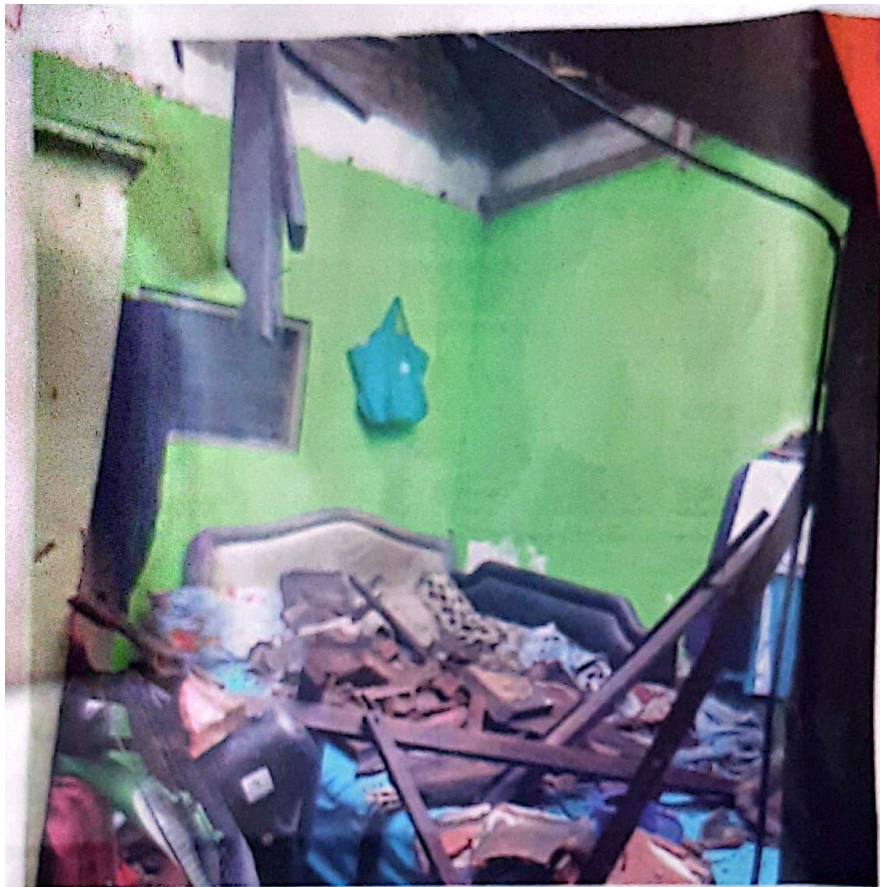
Peringati HKN,...

"Selain itu, di pendopo juga dilakukan pemeriksaan bagi anak usia sekolah dengan peserta sekitar 350 siswa," jelasnya.

Djoko menambahkan, pelaksanaan CKG melibatkan sejumlah tenaga medis dari rumah sakit umum daerah, rumah sakit swasta, serta organisasi profesi kesehatan di Sidoarjo.

"Harapan kami, kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam menyusun program kesehatan ke depan," pungkasnya. (sai/vga)





RUSAK: Tempat atap rumah warga Desa Tenggilan, Kecamatan Candi rusak parah.

Atap Rumah Warga Candi Ambruk Diterjang Angin Kencang

Hujan dan angin kencang menerjang Desa Tenggilan, Kecamatan Candi, Selasa (11/11) kemarin. Hal tersebut menyebabkan satu rumah warga rusak cukup parah.

© Salfar Fathmah, Wawancara: Fajar Sidarto

RUMAH milik Sewadi di Jalan Mangga RT 14 RW 06 menjadi korban. Bagian atap di ruang tamu, tiga kamar dan dapur ambruk setelah dihantam angin. Genteng rumah berjatuhan dan sebagian kayu pen-



yangga ikut patah. Ruangan di dalam rumah langsung tergenang air hujan yang masuk dari atap terbuka. Sewadi dan keluarganya sempat panik saat angin bertenggang.

● Ke Halaman 10

Atap Rumah Warga...

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Riset dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo
Mereka berusaha menyelamatkan diri dari reruntuhan atap.

"Alhamdulillah, tidak ada korban jiwa maupun luka dari kejadian tersebut," ucap Humas Damkar BPBD

Sidoarjo, Yoli Wisnu Purboyo kepada Radar Sidoarjo, Rabu (12/11).

Saat kejadian, petugas BPBD Sidoarjo langsung datang ke lokasi untuk melakukan asesmen. Mereka memastikan tingkat kerusakan dan kebutuhan darurat bagi keluarga terdampak.

"BPBD telah melakukan dua terpal untuk menutupi rumah yang rusak," ujarnya.

Bantuan tersebut untuk menutup atap. Dengan begitu, tidak ada hujan yang masuk. Yoli memastikan



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Pemkab Sidoarjo Bikin Masterplan Atasi Banjir

PEMKAB Sidoarjo juga berupaya menangani banjir di enam kecamatan. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sidoarjo M. Ainur Rohman mengatakan,

penanganan banjir di Sidoarjo tidak hanya tanggung jawab pemkab saja. Tetapi, juga berkaitan dengan kewenangan pemerintah pusat.

"Hal-hal teknis sudah kami

koordinasikan, karena persoalan banjir ini tidak bisa diselesaikan sendiri oleh daerah. Harus ada sinergi antarlevel pemerintahan," ujar Ainur kemarin (12/11) ■

Baca Pemkab... Hal 19

Jawa Pos

Pemkab Sidoarjo Bikin Masterplan Atasi Banjir

Sambungan dari hal 13

Master plan penanganan banjir itu memuat teknis pembangunan infrastruktur hingga strategi kolaborasi dengan masyarakat. Terutama untuk menjaga lingkungan dan sistem drainase di sekitar tempat ting-

gal warga. "Sebesar apa pun penanganan dari pemerintah, tanpa dukungan masyarakat hasilnya tidak akan optimal," ujarnya.

Salah satu fokus utama dalam masterplan tersebut adalah pembersihan dan normalisasi saluran-

saluran air utama yang sering menjadi penyebab genangan. Selain itu, Pemkab berencana melibatkan pemerintah desa melalui program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) pada 2026. BKK itu untuk perbaikan dan normali-

sasi drainase desa.

Di sisi lain, dari pantauan BPBD Sidoarjo genangan air di enam kecamatan mulai surut. "Tim tetap kami siagakan jika ada kondisi cuaca ekstrem lagi," kata Humas Damkar BPBD Sidoarjo Yoli Wisnu. (eza/jun)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Komisi C DPRD Sidoarjo Dukung Penuntasan Frontage Road dengan Anggaran Rp 40 Miliar

Sidoarjo, Memorandum
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo menargetkan pembangunan *frontage road* (jalan pendamping yang sejajar dengan jalan utama) dari Waru sampai Buduran tuntas pada 2026. Target itu mendapat dukungan penuh dari DPRD Sidoarjo.

Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Suyarno, misalnya. Politisi PDI Perjuangan asal Prambon itu mengatakan, anggaran Rp 40 miliar yang disiapkan Pemkab untuk menuntaskan pembangunan *frontage road* yang sudah bertahun-tahun tak kunjung selesai itu juga mendapat dukungan dari dewan. "Lebih cepat, lebih baik. Sebab pembangunan *frontage road* sudah lama dikerjakan tapi tak kunjung tuntas. Kalau sekarang dituntaskan, itu langkah bagus dari Pemkab," ujarnya.

Menurut Suyarno, penuntasan *frontage road* sudah lama ditunggu warga. Khususnya untuk mengurangi kemacetan parah di jalur utama Sidoarjo-Surabaya. Sehingga *frontage road* dapat jadi jalur alternatif. "Surabaya sudah lama menuntaskan *frontage road* untuk mengurangi kemacetan di jalur utama. Kenapa Sidoarjo tidak? Kalau ada kemauan, pasti Pemkab bisa menuntaskan. Pada jam be-

rangkat dan pulang kerja, jalur utama Surabaya-Sidoarjo selalu macet. Setelah *frontage road* difungsikan, semoga kemacetan di jalur utama bisa terurai karena pengendaraan ada alternatif *frontage road*," harapnya.

Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo Choirul Hidayat juga mendukung langkah penuntasan tahun depan. Politisi PDI Perjuangan asal Desa Lebo, Kecamatan Sidoarjo itu mengatakan, dewan tidak hanya mendukung soal dana tapi juga mendukung wal hingga jalan pendamping jalur utama Surabaya-Sidoarjo itu benar-benar tuntas di 2026. "Semua pekerjaan fisik di lingkungan Pemkab akan kita kawal, termasuk *frontage road*," ujar wakil rakyat murah senyum ini.

Choirul Hidayat menambahkan, pengawalan akan dilakukan mulai sekarang. Mulai perencanaan, pelaksanaan pekerjaan, hingga pasca penuntasan pekerjaan. Bila ada



Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Suyarno.



Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo Choirul Hidayat



Wakil Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo Anang Siswandoko

yang tidak beres, dewan akan mengambil langkah-langkah. Semisal, turun ke lokasi dengan sidak dan menggelar *hearing* (rapat dengar pendapat) dengan menghadirkan semua pihak terkait. "Intinya akan kita kawal hingga benar-benar tuntas. Kalau ada yang menyimpang, kita akan mengambil langkah-langkah," tegasnya.

Wakil Ketua Komisi C Anang Siswandoko juga mengemukakan hal senada. Politisi Partai Gerindra asal Candi yang berlatar-belakang profesi kontraktor itu menegaskan, proyek di lingkungan Pemkab pasti akan dikawal dan diawasi dewan. "Proyek harus berjalan sesuai rencana. Tidak boleh menyimpang. Kalau ada yang tidak beres, kita akan sidak dan meng-

gelar *hearing*," ujar wakil rakyat yang dikenal vokal itu.

Terlebih, lanjut dia, proyek *frontage road* itu sudah lama ditunggu warga yang sudah bosan terjebak macet di jam-jam sibuk. Kalau *frontage road* difungsikan, kemacetan di jalur utama akan terurai karena ada pilihan lain guna menghindari kemacetan. "Kalau ada kemauan, Sidoarjo pasti bisa menuntaskan. Sebab Sidoarjo merupakan kabupaten dengan pendapatan asli daerah (PAD) tertinggi. Anggaran untuk menuntaskan *frontage road* tersedia. Dewan juga mendukung penganggaran. Tinggal mau tidak menuntaskan *frontage road*," tegasnya.

Pemkab memang menargetkan pembangunan *frontage road* dari Waru sampai Buduran tuntas

seluruhnya di 2026. Target ini seiring terurainya penghambat pembangunan, pembebasan makam desa. "Pada 2026 sudah kita siapkan Rp 40 miliar untuk pembangunan jembatan dan jalan, agar semuanya bisa selesai 2026," jelas Bupati Sidoarjo Subandi setelah rapat pembahasan pembangunan *frontage road* untuk kawasan Kedungrejo dan Waru, Senin (3/11).

Ada dua lahan makam di kawasan Waru. Pertama lahan makam Desa Krajangkulon dan makam Desa Kedungrejo. Kendala kedua lahan makam itu, yakni terkait pemindahan lahan sebelum tercapai kesepakatan antara Pemkab, warga, dan pemerintah desa (pendes) setempat.

Termasuk, dengan Badan



Frontage road yang menghubungkan Surabaya dengan Sidoarjo bakal dituntaskan tahun depan.

Pertanahan Nasional (BPN) yang pada 5 November 2025, melakukan pembayaran kepada pemilik lahan sebagai bentuk ganti rugi lahan makam. Nantinya, setelah pembayaran selesai, makam akan dilanjut proses pengukuran peta bidang. "Yang di Waru sudah selesai. Kalau ada warga Waru yang meninggal dunia, sudah bisa dimakamkan di lahan makam baru," kata Subandi.

Sementara untuk lahan makam umum Desa Kedungrejo, sudah ada musyawarah desa-terkait lahan peng-

ganti. "Ada tanah seluas 1.500 meter persegi di Kedungrejo Barat," tambah Subandi.

Selain itu, Pemkab Sidoarjo juga akan terus berkoordinasi dengan Kementerian terkait untuk menentukan langkah-langkah apa yang dapat dilakukan. Bupati berharap pembangunan *frontage road* sepanjang 9,4 km itu segera tuntas. Pemkab bahkan siap menampung seluruh pekerjaan fisik mulai Juni 2026. Baik pembangunan jembatan maupun ruas jalan. (ach/kri/san/epe)

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN
Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, PT. BANK KB
BUNOPIN SYARIAH selaku Pemegang Hak Tanggungan akan melakukan lelang Eksekusi Hak

MEMORANDUM
BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR

Komisi C DPRD Sidoarjo Dukung Frontage Road

Sidoarjo – HARIAN BANGSA

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo menargetkan pembangunan frontage road (jalan pendamping yang sejajar dengan jalan utama) dari Waru sampai Buduran tuntas tahun 2026 mendatang. Penuntasan frontage road yang menghubungkan Surabaya dengan Sidoarjo itu mendapat dukungan penuh dari DPRD Sidoarjo.

Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Suyarno, misalnya. Politisi PDI Perjuangan asal Prambon itu mengatakan, anggaran Rp 40 miliar yang disiapkan Pemkab untuk menuntaskan pembangunan frontage road yang sudah bertahun-tahun tak kunjung selesai itu juga mendapat dukungan dari dewan. "Lebih cepat, lebih baik. Sebab pembangunan frontage road sudah lama dikerjakan tapi tak kunjung tuntas. Kalau sekarang dituntaskan, itu langkah bagus dari Pemkab," ujarnya.

Menurut Suyarno, penuntasan frontage road sudah lama ditunggu warga. Kalau frontage road, warga yang selama ini terjebak kemacetan di jalur utama Sidoarjo-Surabaya, bisa memilih jalur alternatif, yakni frontage road. "Surabaya sudah lama menuntaskan frontage road untuk mengurangi kemacetan di jalur utama. Kenapa Sidoarjo tidak? Kalau ada kemauan,

pasti Pemkab bisa menuntaskan. Pada jam berangkat dan pulang kerja, jalur utama Surabaya-Sidoarjo selalu macet. Setelah frontage road difungsikan, semoga kemacetan di jalur utama bisa terurai karena pengendara ada alternatif frontage road," harapnya.

Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo Choirul Hidayat juga mendukung penuntasan frontage road tahun 2026 mendatang. Politisi PDI Perjuangan asal Desa Lebo, Kecamatan Sidoarjo mengatakan, dewan tidak hanya mendukung soal dana Rp 40 miliar untuk penuntasan frontage road, tapi juga akan mengawal hingga jalan pendamping jalur utama Surabaya-Sidoarjo itu benar-benar tuntas tahun 2026. "Semua pekerjaan fisik di lingkungan Pemkab akan kita kawal, termasuk frontage road," ujar wakil rakyat murah senyum ini.

Choirul Hidayat menambahkan, penga-



Choirul Hidayat
Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo

walan akan dilakukan mulai sekarang. Mulai perencanaan, pelaksanaan pekerjaan, hingga pascapenuntasan pekerjaan. Bila ada yang tidak beres, dewan akan mengambil langkah-langkah. Semisal, turun ke lokasi dengan sidak dan menggelar hearing (rapat dengar pendapat) dengan menghadirkan semua pihak terkait. "Intinya akan kita kawal hingga frontage road

benar-benar tuntas tahun 2026. Kalau ada yang menyimpang, kita akan mengambil langkah-langkah," tegasnya.

Wakil Ketua Komisi DPRD Sidoarjo Anang Siswandoko juga mengemukakan hal senada. Politisi Partai Gerindra asal Candi yang berlatar-belakang profesi kontraktor itu menegaskan, proyek di lingkungan Pemkab pasti akan dikawal dan diawasi dewan. "Proyek harus berjalan sesuai rencana. Tidak boleh meny-

impang. Kalau ada yang tidak beres, kita akan sidak dan menggelar hearing," ujar wakil rakyat yang dikenal vokal itu.

Terlebih, lanjut dia, proyek frontage road yang menghubungkan Surabaya dengan Sidoarjo. Penuntasan frontage road sudah lama ditunggu warga yang setiap hari terjebak kemacetan pada jam berangkat dan pulang kerja di jalur utama yang menghubungkan Surabaya dengan Sidoarjo. Kalau frontage road difungsikan, kemacetan di jalur utama akan terurai karena pengendara ada pilihan frontage road guna menghindari kemacetan. "Kalau Surabaya bisa tuntas, kenapa Sidoarjo tak kunjung tuntas sampai sekarang? Kalau ada kemauan, Sidoarjo pasti bisa menuntaskan. Sebab Sidoarjo adalah kabupaten dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tinggi. Anggaran untuk menuntaskan frontage road tersedia. Dewan juga mendukung penganggaran. Tinggal mau tidak menuntaskan frontage road," tegasnya.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo memang menargetkan pembangunan frontage road dari Waru sampai Buduran tuntas seluruhnya 2026 mendatang. Target ini seiring keberhasilan Pemkab mengurai persoalan yang menghambat pembangunan, yakni persoalan lahan makam desa. (md/rus)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Dinas Pangan dan Pertanian Gelar FKP

SIDOARJO - Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) di ruang pertemuan kantor dinas setempat, Rabu (12/11/25). Kegiatan ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan Dinas Pertanian, akademi dari Unesa dan Unesa, hingga pelaku usaha dan media,

guna membahas peningkatan kualitas pelayanan publik serta isu-isu strategis di sektor pangan dan pertanian.

Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Sidoarjo, Dr. Eni Rustaningsih, ST., MT., menjelaskan kegiatan FKP merupakan bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang

menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam peningkatan mutu pelayanan.

"Kami menghadirkan seluruh stakeholder dalam rangka perbaikan manajemen di dinas, sekaligus untuk mendapatkan masukan terhadap isu-isu strategis baru," ujar Eni.

Menurutnya, sektor pangan dan pertanian mencakup proses hulu hingga hilir, mulai dari budidaya tanaman dan peternakan hingga tahap hilirisasi. Salah satu kendala yang dihadapi saat ini ialah terkait sistem perizinan digital melalui OSS (Online



Forum Komunikasi Publik (FKP) yang digelar Dinas Pangan dan Pertanian, Rabu (12/11/25)



Bupati KH Khalilud Dinan dan Wakil Bupati H. Sukirwanjo saat menghadiri acara Festival Batik Madura memeriahkan Hari Jadi Provinsi

Single Submission) yang sering mengalami gangguan di tingkat pusat, sehingga menyulitkan pemerintah daerah dalam melanjutkan proses perizinan.

"Hal seperti ini seharusnya bisa diselesaikan dengan diskresi secara manual. Masyarakat tidak mau tahu apakah itu kewenangan pusat atau daerah, yang mereka harapkan proses cepat selesai. Kami harap komunikasi dengan Kemenko juga lebih terbuka agar kendala teknis seperti ini dapat diantisipasi," jelasnya.

Selain itu, Eni juga menyebut perlunya penambahan laboratorium uji di Sidoarjo. "Saat ini hanya ada tiga lab uji. Kami berharap bisa ditambah dua

lagi agar layanan lebih cepat dan tidak menumpuk. Masukan seperti ini nanti akan kami sampaikan ke tim anggaran," tambahnya.

Dalam forum tersebut, salah satu peserta (tamu undangan) dari media, Loeth dari Duta Masyarakat juga menyampaikan berbagai pertanyaan dan keluhan yang kerap ditemui dilapangan. Beberapa di antaranya terkait lamanya proses OSS ketika aplikasi error, kerumitan izin masuk hewan ternak, serta penjualan pupuk yang tidak sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Produksi Peternakan, drh. Tony Hartono melalui stafnya

Rina, menjelaskan bahwa hewan ternak dari luar daerah atau luar pulau wajib terdaftar dalam aplikasi ISIKHNAS (Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional).

"Peternak harus memiliki akun ISIKHNAS dan mendaftar terlebih dahulu. Jika daerah asal dan Sidoarjo sama-sama berstatus ada kasus PMK, maka masih diperbolehkan masuk. Namun bila penyakit lain yang berbeda status, maka tidak bisa," terangnya.

Sementara itu, Kabid Sarana Prasarana Pertanian dan Penyuluhan, Nusfa Musdalifah, menanggapi persoalan distribusi pupuk yang sempat menimbulkan gejala di kalangan petani.

"Beberapa waktu lalu memang

ada permasalahan terkait pupuk. Ada dua hal, yakni stok dan harga. Jika ada penjualan di atas HET, kami sudah sering sosialisasikan kepada Poktan dan Gapoktan untuk membuat surat kesepakatan internal. Jadi jika ada harga lebih tinggi, itu harus jelas peruntukannya," ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa penyimpanan pupuk tanpa surat keterangan resmi di gudang atau rumah bisa dikategorikan sebagai penimbunan oleh aparat penegak hukum (APH).

"Kalau pupuk disimpan tanpa izin yang jelas, itu bisa dianggap penimbunan. Jadi Poktan harus memastikan kelengkapan administrasi," tegasnya. ● Loe

DAUTA
MAGAZINE



DOK POLSEK BALONGBENDO

JAGA KESELAMATAN: Polisi mengingatkan pemilik perahu tambang untuk mewaspadai air sungai yang meluap.

Debit Sungai Brantas Naik, Pemilik Perahu Tambang Diminta Waspada

SIDOARJO – Seiring tingginya intensitas curah hujan, debit air Sungai Brantas yang melintasi wilayah Balongbendo meningkat. Polisi mengimbau seluruh pemilik perahu tambang untuk waspada terhadap tingginya volume air sungai.

Kemarin (12/11), anggota Polsek Balongbendo melakukan sosialisasi keselamatan secara langsung. Sejumlah lokasi penyeberangan didatangi. Petugas juga mengecek standar keamanannya.

Kapolsek Balongbendo AKP Sugeng Sulistiyono menjelaskan, arus air mulai kencang setelah hujan deras terjadi di beberapa titik. Untuk memastikan keamanannya, seluruh jasa penyeberangan sungai dicek. "Imbauan dilakukan pekan kemarin saat hujan deras," kata Sugeng.

Polisi tak ingin kecolongan dan tragedi di Desa Bogem Pinggir 2017 silam terulang. Saat itu perahu tambang terbalik akibat arus deras. Enam orang meninggal akibat kejadian tersebut.

Sugeng mengatakan, di wilayahnya terdapat 10 titik tambangan. Lokasi lainnya terletak di Desa Bogem Pinggir dan Desa Jeruk Legi. "Di setiap tambangan sudah disediakan pelampung untuk jaga-jaga. Semua sudah diminta untuk meningkatkan keselamatan," ungkapnya. (edi/hen)

Jawa Pos





ANGGER BONDAN/JAWA POS

BOLONG: Petugas LPBI MWC NU Kecamatan Candi Deni Wahyu turut mengecek kondisi rumah Malichah yang atapnya ambrol usai diterjang angin kencang. Perbaikan rumah dibantu pemerintah.

Angin Kencang Rusak Rumah di Candi

SIDOARJO – Hujan deras dan angin kencang yang terjadi di Kota Delta tidak hanya melahirkan genangan. Satu rumah di Desa Tenggulunan, Candi, rusak gara-gara diterjang angin kencang. Korban terpaksa mengungsi karena hunian tak layak ditempati.

Pemilik rumah, Malichah menjelaskan jika musibah yang dialaminya terjadi Selasa (11/11) sore. Saat itu, hanya ada suaminya di kamar. "Saya dikabari rumah ambruk sekitar 15.00. Di rumah hanya ada

suami saya yang sedang istirahat karena sedang sakit," katanya kemarin (12/11).

Wanita 52 tahun itu mengatakan suaminya berhasil lari saat mendengar ada suara yang tidak beres di atap rumah. "Dia bangun terus lari. Nggak lama ambrol atapnya," imbuh Malichah. Gara-gara genting berjatuh, bagian ruang tamu, kamar tidur dan dapur rusak parah.

Kini, Malichah terpaksa mengungsi ke rumah tetangga. Dia berharap ada bantuan dari

pemerintah daerah untuk merenovasi rumahnya.

Humas Damkar BPBD Sidoarjo Yoli Wisnu mengungkapkan jika pihaknya sudah menurunkan tim ke lokasi setelah menerima laporan. Sementara, kondisi rumah saat ini memang tidak layak huni dan berpotensi membahayakan jika tetap ditempati. "Petugas langsung melakukan asesmen di lokasi. Sementara sudah diberikan bantuan terpal untuk penanganan awal," ujarnya. (eza/hen)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Musim Hujan Datang, Banjir Selalu Menggenang, Cak Nasih : Tidak Hanya Masyarakat Yang Jengkel, Kita Juga Kesal Melihat Kinerja Pemkab Sidoarjo



SIDOARJO (RadarJatim.id) – Bencana banjir selalu membayangi warga di Kabupaten Sidoarjo setiap kali musim hujan datang. Khususnya dititik-titik yang selama ini selalu menjadi langganan banjir tahunan tersebut, seperti disekitaran Kali Buntung-Kecamatan Waru, depan Lippo Plaza-Kecamatan Sidoarjo, Desa Kedungbanteng-Kecamatan Tanggulangin, Desa Pesawahan-Kecamatan Porong dan beberapa kecamatan lainnya.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo, H. Abdillah Nasih tidak dapat menyembunyikan keengkelannya terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo yang selama ini dianggap tidak mampu dan tidak memiliki solusi dalam menyelesaikan permasalahan banjir tersebut.

“Sebenarnya tidak hanya masyarakat saja yang merasa jengkel, kita-kita di DPRD (Sidoarjo, red) kesal juga. Karena sudah berkali-kali kita warning ke eksekutif, tapi kenyataannya tetap seperti ini aja,” kata Ketua Abdillah Nasih saat ditemui awak media di kantornya, Rabu (12/11/2025).

Pria yang akrab disapa Cak Nasih itu mengatakan bahwa Pemkab Sidoarjo harusnya memiliki langkah-langkah jangka pendek dan jangka panjang dalam menyelesaikan permasalahan banjir yang datang setiap musim hujan ini.

Langkah-langkah jangka pendek dalam mengatasi banjir sebagaimana disampaikan oleh Cak Nasih bahwa Pemkab Sidoarjo sudah seharusnya menyiapkan pompa air dan pembuangannya serta antisipasi ketika hujan akan turun.

“Jangka panjangnya harus ada penataan ruang secara menyeluruh, ini semua terkait dengan RDTRK (Rencana Detail Tata Ruang Kota, red) dari eksekutif,” katanya.

Pemkab Sidoarjo harus melakukan penataan drainase dikawasan pemukiman serta perbaikan jalan dikawasan industri sehingga permasalahan banjir ini bisa teratasi, dan tidak menghantui masyarakat ketika musim hujan datang.

Untuk itu, DPRD akan segera memanggil beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemkab Sidoarjo. Karena penanganan masalah banjir ini, tidak bisa ditangani oleh salah satu OPD saja.

“OPD-OPD harus mengesampingkan ego sektoral, tapi harus bisa bekerjasama untuk mengatasi masalah banjir ini. Kita nggak akan keberatan untuk mengalokasikan anggaran yang lebih besar, selama itu untuk kepentingan rakyat,” ucapnya.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) Sidoarjo itu menilai bahwa selama ini Pemkab Sidoarjo tidak serius atau tidak memiliki perencanaan jangka panjang terkait kawasan-kawasan yang menjadi langganan banjir ketika musim hujan datang.

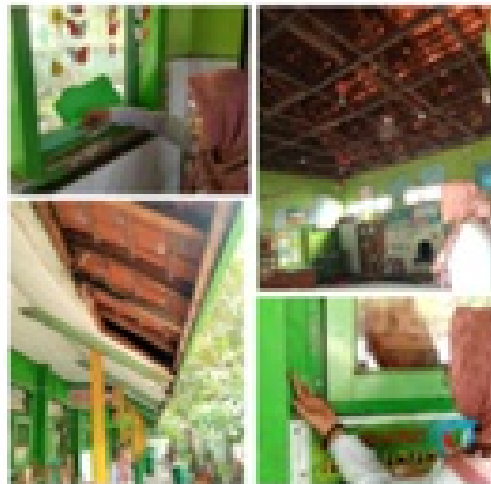
Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo
“harus ada target tiap tahun ada penanganan kawasan-kawasan yang jadi langganan banjir tersebut,” tegasnya. (mams)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Kondisi SDN Tebel Kecamatan Gedangan, Plafon Kelas Ambrol, Kusen Bangunan Lapuk, Hujan Turun Kerap Banjir



SIDOARJO (liputansidoarjo.com)- Meskipun baru mendapatkan renovasi bangunan kelas satu dan dua, namun secara keseluruhan kondisi SDN Tebel Kecamatan Gedangan ini sangat memperihatinkan.

Selain delapan ruang kelas V dan VI yang kusen kayunya sudah lapuk dan plafon yang sebagian ambrol, setiap hujan deras turun, dipastikan sekolah yang berada di pinggir jalan provinsi ini banjir.

Endah S Pd MPd kepala SDN Tebel saat ditemui di sekolah menuturkan, untuk siswa kelas V dan VI, saat ini proses belajar mengajarnya ditempatkan di Mushola secara bergiliran.

Ini terpaksa dilakukan, karena plafon ruang kelas sebelumnya sempat ambrol, kini menyisakan kayu-kayu yang menggantung dan berpotensi ambruk.

"Kita khawatir nanti saat belajar tiba-tiba ambruk dan menimpa murid-murid," ujar Endah.

Khusus untuk kondisi banjir, beberapa kali pihak sekolah mesti memulangkan siswa lebih cepat sebelum turun hujan.

Pasalnya, tumpahan air hujan dari jalan raya ditambah air hujan yang turun di area sekolah, dipastikan membuat sekolah banjir.

"Juga karena selokan pembuangan kita kondisinya kecil," ujar Endah.

Karena Endah berharap, meskipun tahun ini sudah ada pembangunan untuk ruang kelas satu dan dua, pihaknya berharap di tahun 2026 ada prioritas untuk pembangunan kelas V dan VI.

"Karena ruang kelasnya sudah tidak layak untuk proses belajar mengajar," tutur Endah.

Sementara itu DR Emir Firdaus anggota komisi C DPRD Sidoarjo, menyatakan prihatin atas keadaan ruang kelas V dan VI di SDN Tebel yang sudah pada lapuk kayu atap dan kusenya.

Politisi PAN ini berharap ada solusi cepat dari pemerintah daerah, karena anggaran pendidikan yang ada saat ini masih belum memadai.

Apalagi kondisi serupa, tidak hanya dialami SDN Tebel saja, namun juga banyak terjadi di sekolah lain di Sidoarjo.

"Solusinya bisa dengan memanfaatkan CSR yang ada untuk pembangunan ruang kelas baru yang sudah tidak layak pakai. Kita berharap Dinas pendidikan secepatnya bergerak untuk renovasi ruang kelas yang sudah lama ini," tegas Emir Firdaus. (Abidin.)

■ "OPD-OPD harus mengesampingkan ego sektoral, tapi harus bisa bekerjasama untuk mengatasi Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Riset dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo lebih besar selama itu untuk kepentingan rakyat," ucapnya.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) Sidoarjo itu menilai bahwa selama ini Pemkab Sidoarjo tidak serius atau tidak memiliki perencanaan jangka panjang terkait kawasan-kawasan yang menjadi langganan banjir ketika musim hujan datang.

"Harus ada target tiap tahun ada pengurangan kawasan-kawasan yang jadi langganan banjir tersebut," tegasnya. (mams)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Sejak 2018 Tak Ditangani Serius, Ini Beberapa Solusi Atasi Langganan Banjir di Depan Lippo Plaza Tawaran DPRD Sidoarjo



Sidoarjo (republikjatim.com) - Sejumlah pimpinan dan anggota Komisi C DPRD Sidoarjo menawarkan sejumlah solusi sebagai upaya penanganan langganan banjir di depan Lippo Plaza dan Tol Sidoarjo. Beberapa langkah solutif yang bisa dilaksanakan untuk mengatasi masalah langganan banjir itu, patut dilaksanakan sebagai upaya penanganan solutif dalam jangka pendek dan jangka panjang.

Apalagi, banjir langganan di salah satu mall pusat Kota Delta yang terjadi sejak Tahun 2018 itu, tidak pernah ada solusi penanganannya. Terutama penanganan jangka panjang.

Sejak terjadi banjir 8 tahun lalu, solusinya hanya menyiagakan mesin pompa. Dari awalnya diberi 1 mesin pompa air, kini bertambah menjadi tiga mesin pompa air. Namun, banjir seakan tidak pernah kompromi hingga banjir besar dan genangan tertinggi terjadi pada Senin (10/11/2025) kemarin siang hingga malam hari.



Usia melaksanakan sidak ke lokasi banjir dengan mengecek tiga pompa air, saluran air (drainase) yang ada di selatan dan utara JL Raya Jati, pimpinan dan anggota Komisi C DPRD Sidoarjo menawarkan sejumlah solusi jangka pendek dan jangka panjang.

"Solusi jangka pendek yang harus segera dilaksanakan mulai pekan ini adalah menyiagakan mesin pompa air selama 24 jam. Harapannya, agar siap dioperasikan sesegera mungkin saat air hujan turun. Termasuk juga meviapkan aliran listrik dan gensetnya. Jangan sampai mesin pompa air siap akan tetapi ketika aliran listrik padam tidak mesin pompa air yang disiagakan tidak dapat digunakan (dioperasikan)." ujar Wakil Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo, Anang Siswandoko kepada republikjatim.com, Rabu (12/11/2025) usai sidak di lokasi langgan banjir di depan Lippo

Plaza Sidoarjo didampingi para pejabat Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBM dan SDA) Pemkab Sidoarjo mulai Dwi Eko Saptono, Supravitno, Farid dan beberapa petugas jaga pompa air di depan Lippo Plaza Sidoarjo itu.



Selain itu, lanjut politisi Partai Gerindra Daerah Pilihan (Danil) 1 meliputi Kecamatan Sidoarjo, Buduran dan Kecamatan Sedati ini juga dibarengi dengan pembersihan seluruh saluran air (drainase) yang ada di di kanan dan kiri atau utara dan selatan JL Raya Jati.

"Terutama membersihkan semua saluran air yang masih tertutup harus dibersihkan secara menyeluruh. Harapannya, agar tidak ada lagi sumbatan air saat hujan deras dengan intensitas tinggi dan terjadi selama berjam-jam," ungkap Anang Siswandoko yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Sidoarjo ini.



Tidak hanya itu saja, lanjut Anang yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo ini, harus ada pendampingan solusi lainnya. Diantaranya membuat sebanyak - banyaknya resapan air (biopori) di sekitar wilayah langganan banjir tahunan setiap musim hujan itu.

"Juga harus ada lubang resapan air (biopori) sebanyak mungkin di seluruh area langganan genangan air banjir. Karena biopori ini yang akan memungkinkan untuk meningkatkan resapan air di sekitar lokasi banjir. Beberapa solusi jangka pendek ini harus segera dilaksanakan pekan ini atau paling lambat dua pekan ke depan," tegas Anang Siswandoko yang dikenal berangkat menjadi anggota DPRD Sidoarjo dari jalur pengusaha (kontraktor) ini.



Hal yang sama disampaikan anggota Komisi C DPRD Sidoarjo. Muh Nizar yang juga turut dalam sidak pagi itu. Menurut Nizar terdapat beberapa solusi jangka panjang yang bisa dilaksanakan untuk menangani banjir di depan Lippo Plaza Sidoarjo itu. Salah satunya adalah membuat (memasang pintu air) di saluran pembuangan dari mesin pompa air yang stand by 24 di depan Lippo Plaza Sidoarjo.

"Pemasang pintu air di lokasi pembuangan air dari mesin pompa ke arah selatan atau Sungai Sidokare itu sangat penting. Karena pintu air ini, akan berfungsi untuk menutup saluran saat air pasang dan membukanya saat surut. Termasuk mencegah air kembali meluber dari avour Sungai Sidokare agar tidak kembali (meluber) ke utara menuju JL Raya Jati saat mesin pompa air dihidupkan (dinyalahkan)." pinta politisi senior Partai Golkar Sidoarjo yang akrab disapa Cak Nizar ini.



Kemudian, lanjut Nizar sebanyak tiga mesin pompa air yang disiagakan di timur Tol Sidoarjo atau depan Lippo Plaza itu harus dipisah. Salah satu mesin pompa air itu harus ditempatkan di bagian Utara JL Raya Jati atau di sekitar pagar Lippo Plaza Sidoarjo.

"Pembagian penempatan mesin pompa air ini agar sistem pompa air berjalan maksimal. Kalau sistem penvedotan air dipisah menjadi dua yakni untuk wilayah selatan dan wilayah utara akan bekerja maksimal. Tatapannya, agar penvedotan dan pembuangan banjir tidak hanya terpusat di satu titik saja. Akan tetapi bisa dibagi dua dan sebagian disalurkan ke Utara untuk diarahkan ke Sungai Pucang. Hal itu, sebagai upaya saat terjadi peningkatan debit air hujan atau air sudah menggenangi JL Raya Jati." urai Nizar yang dikenal sebagai politisi senior Partai Golkar Sidoarjo dari Dapil IV meliputi wilayah Kecamatan Krian, Balongbendo dan Kecamatan Tarik ini.



Menurut Nizar usai Sidak itu, pihaknya bakal menyampaikan beberapa solusi jangka pendek dan jangka panjang itu. Termasuk berencana membuka atau melepas plat beton yang menjadi pemicu utama saluran air tidak mengalir. Akan tetapi pembukaan atau pembongkaran plat beton itu, harus dikoordinasikan dengan pihak Lippo Plaza Sidoarjo dan tim Jasa Marga sebagai pihak pengelola Tol Sidoarjo.

"Semua temuan hasil sidak ini, akan kami sampaikan ke Dinas PUBM dan SDA serta Bupati Sidoarjo. Kami juga meminta Dinas PUBM dan SDA mengajak atau melibatkan Lippo Plaza dan Jasa Marga dalam mencari dan menangani langganan banjir yang sudah terjadi selama bertahun-tahun itu," paparnya.



Sedangkan untuk solusi penambahan dan pelebaran drainase di kanan dan kiri Lippo Plaza Sidoarjo hingga di depan Perumahan Pondok Mutiara itu, sebagai tambahan solusi jangka panjang saja. Apalagi, untuk proyek fisik perluasan dan penambangan drainase cadangan itu, baru bisa dikerjakan atau dilaksanakan tahun depan.

"Normalisasi saluran (drainase) maupun pelebaran) saluran air memang masih memungkinkan. Tapi itu masuk proyek jangka panjang yang mungkin baru bisa dilakukan tahun depan. Termasuk, target pelebaran drainase yang perlu dilebarkan menjadi 1,5 hingga 2 meter untuk meningkatkan kapasitas saluran air bakal dibahas penganggarannya secepatnya," jelas Nizar yang dikenal sebagai politisi Partai Golkar yang lebih dekat dengan masyarakat dan merakyat di wilayah Sidoarjo Barat ini.

Sementara Kepala Dinas PUBM dan SDA Pemkab Sidoarjo, Dwi Eko Saptono menegaskan, genangan banjir yang terjadi di depan Lippo Plaza kemarin itu terjadi karena curah hujan yang sangat tinggi. Yakni mencapai di atas 155 mm yang dikategorikan sebagai hujan ekstrem. Namun



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

pihaknya juga melaksanakan kesiapan dan penanganan cepatnya dengan mensiagakan tiga pompa air yang sudah disiapkan di lokasi itu.

"Makanya dalam penanganan genangan air banjir Senin (10/11/2025) kemarin itu sudah dilakukan dengan cepat dan maksimal. Hingga area terdampak genangan air banjir sudah bisa kering pada pukul 21.00 WIB lebih genangan sudah kurang saat kejadian malam itu." katanya.



Selain itu, pejabat senior Pemkab Sidoarjo yang akrab disapa Dwi ini mengungkapkan pihaknya juga sudah berencana melaksanakan tindak lanjut dan solusi jangka panjang untuk penanganan banjir ini. Harapannya, agar tidak terjadi genangan air banjir lagi. Diantaranya Dinas PUBM dan SDA berencana memiliki rencana memperbaiki dan membersihkan saluran air. Termasuk pembukaan dan pembersihan seluruh jaringan drainase yang berada di bawah jembatan (Tol) Sidoarjo akan dibuka dan dibersihkan meski hal ini memerlukan perizinan terlebih dahulu.

"Kemudian untuk penanganan sisi timur pembuangan air ke sisi selatan (arah Sungai Sidokare) sudah aman. Fokus selanjutnya sisi timur yang memerlukan koordinasi dengan Lippo Plaza dan pihak Jasa Marga. Termasuk,

pembongkaran plat beton penghambat saluran air. Karena terdapat beberapa jembatan atau plat beton yang menghalangi aliran air. Rencana akan dibongkar plat di Entry Tol Sidoarjo menggunakan breaker setelah ada kesepakatan, lalu memperbaikinya agar genangan air mengalir lancar," tandasnya.

Tidak hanya itu, kata Dwi pihaknya juga bakal berkoordinasi untuk peningkatan kapasitas aliran air. Khususnya di sekitar area Lippo Plaza utamanya di depan Lippo Plaza. Hal ini menunggu kesepakatan Lippo Plaza. Termasuk soal peninggian jembatan diharapkan pihak Lippo Plaza dapat membantu meninggikan jembatan, terutama di pintu masuk atau keluar) di depan Lippo Plaza dengan ketinggian kurang lebih 40 cm. Peninggian ini penting karena saat hujan, jembatan keluar masuk Lippo Plaza itu menghalangi aliran air. "Rencana terakhir yakni penyesuaian operator mesin pompa air. Karena masalah operator ini setelah peninggian jembatan harus disesuaikan. Karena mengingat terdapat jalan tersendiri dan tidak mengganggu kondisi jalan provinsi JL Raya Sidoarjo - Krian (JL Raya Jati)," pungkasnya. Adv/Arv/Waw

